

KAJIAN AWAL ANALISIS HUB-PENGETAHUAN: STUDI TENTANG PUSLIT KEMASYARAKATAN DAN KEBUDAYAAN (P2KK-LIPI)

PRELIMINARY STUDY OF HUB-KNOWLEDGE: STUDY OF RESEARCH CENTRE FOR SOCIAL AND CULTURE – INDONESIA INSTITUTE OF SCIENCES (P2KK-LIPI)

Widjajanti M. Santoso

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI
widjasantoso@gmail.com

Abstract

The position and function of academics in Indonesia, historically is always takes sides. Contemporary social and political dynamic, enhances it further, therefore it differs from the western's academic which function as guardian of the neutrality. There always some power relation that puts academics as supporters, but still on the other hand, balancing support and academic expertise are important. As academic, they build their integrity through field work and their empathy toward the subject's community. The use of hub knowledge as tool to analyse the dynamic of research institute shows the need for developing networks. One of the possibility is through inter Asia referencing, practicaly for academic activities, strategically is for developing dialog between the existent of old knowledge authority and inter Asia referencing.

Keywords: *hub-knowledge, network, inter Asia referencing, social science*

Abstrak

Dinamika perkembangan ilmu sosial mempengaruhi berkembangnya kegiatan pada pusat penelitian dan sebaliknya. Kajian awal dari capaian satuan kerja merefleksikan posisi ilmuwan, dalam kasus ini adalah ilmuwan sosial. Berbeda dari perkembangan ilmuwan sosial di Barat yang memposisikan ilmuwan sosial netral, tidak berpihak, penjaga gerbang, maka di Indonesia ilmuwan sosial sudah sejak awal membela posisi tertentu. Selebihnya berposisi merupakan bagian dari situasi politik internal, di mana ilmuwan adalah bagian dari dukungan terhadap pengelompokan tertentu. Akan tetapi hubungan dan empati kepada masyarakat turut mewarnainya. Analisis menggunakan *hub-knowledge* yang melihat kondisi yang ada dan beberapa kegiatan yang dilakukan peneliti di alam aktivitas akademisnya. Di lapangan para peneliti tidak dapat melepaskan diri dari masalah masyarakat lokal dengan mengembangkan program bersama. Secara internal, ilmuwan sosial di lembaga penelitian menjadi ujung tombak capaian individu dan kelembagaan. Analisis *hub-knowledge* menunjukkan kebutuhan untuk dikembangkan, salah satu yang potensial adalah jejaring yang berdasar pada abstraksi pengetahuan lokal, melalui pola *inter Asia referencing*.

Kata kunci: *hub-pengetahuan, jejaring, inter Asia referencing, ilmu sosial.*

Pendahuluan

Di Indonesia, perkembangan ilmu sosial¹ merupakan isu penting tetapi jarang dijadikan subjek kajian. Di dalam diskusi akademis maupun percakapan umum, isu ini muncul di

¹Menurut Mestika Zed (2014), ilmu budaya termasuk di dalam ilmu sosial dalam makalah ini ilmu sosial termasuk ilmu budaya. Perbedaan di antara dua rumpun ini sering terjadi dan dapat dilihat dari penamaan satker P2KK (Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan), yang mensiratkan pembagian tersebut. Walaupun di dalam kegiatannya, pembatasan tersebut sudah runtuh dan kegiatan bersifat multidisiplin,

dalam wacana tentang sumbangan ilmu sosial, yang kurang terasa. Umumnya akan ada komentar bahwa ilmu sosial penting untuk menjawab isu-isu masa kini, seperti merosotnya sopan santun, pendangkalan kesadaran nasionalisme, rendahnya jiwa wira usaha, dan lainnya. Pandangan asumptif bahwa diskusi tentang hal ini jarang dilakukan, didasarkan pada kecenderungan mengukur capaian pembangunan berdasarkan indikator yang dapat dilihat oleh panca indera. Wacana tentang lemahnya nilai dan hubungan sosial muncul dalam bentuk keluhan-keluhan, tetapi jarang dijadikan perhatian program pembangunan.

Pada kenyataannya, konteks perkembangan ilmu sosial jauh lebih dinamis dan penuh lika liku. Tulisan ini memaparkan dua hal. *Pertama*, gambaran tentang perkembangan keilmuan dan posisi akademisi atau cendekiawan ilmu sosial secara umum, yang mempengaruhi posisi, kontribusi, serta kegiatan akademis. Di dalam penjelasan di bawah ini, diperlihatkan posisi ilmuwan yang cenderung berpihak, tetapi akan diilustrasikan juga bahwa ilmuwan sosial Indonesia juga memiliki jarak terhadap kekuasaan. Tulisan ini menggunakan kata cendekia, akademisi, dan akademika secara bergantian, tanpa melihat perbedaannya. Oleh karena itu, paparan pertama adalah mengenai konteks teoritis dan implikasinya di Indonesia.

Paparan komprehensif tentang ilmu sosial yang dilihat dari konteks kekuasaan dapat dilihat pada tulisan Daniel Dhakidae (2003) yang berjudul *Ilmu Pengetahuan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Buku ini memotret sumbangan para ilmuwan yang dikelompokkan dalam kelas cendekiawan, baik dalam konteks diskusi teoretik maupun di dalam jejak-jejak sumbangan mereka. Satu hal menarik dari paparan Dhakidae adalah tentang posisi cendekiawan. Di Barat mereka diposisikan sebagai penjaga moral dan penjaga keseimbangan antara modal dan kekuasaan. Di Asia atau Dunia Ketiga pada umumnya dan di Indonesia, untuk kasus ini, cendekia merupakan bagian dari kekuasaan. Posisi mereka sangat penting karena keterkaitan mereka dengan isu-isu nasionalisme. Konteks kesejarahan dan sosial dari akademika di Indonesia ternyata memperlihatkan perubahan, menyesuaikan dengan situasi kekuasaan dan kebebasan (Zed, 2014).

Kedua, eksplorasi terhadap kegiatan Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), khususnya melalui kegiatan penelitian, terbitan buku, dan kegiatan akademis lainnya, sebagai kasus keberlanjutan dari ilmu sosial di LIPI khususnya dan sebagai kasus kasus problematika perkembangan ilmu sosial secara umum. Eksplorasi ini penting untuk mengembangkan tidak hanya kegiatan dari lembaga tetapi juga jejaring dan posisinya sebagai *hub-pengetahuan*, dalam area yang lebih luas. Dalam visinya, LIPI sendiri ingin menjadi *world class institution*, dan tulisan ini diharapkan menggambarkan upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Dalam mencapai upaya tersebut dibutuhkan kebesaran hati untuk melakukan analisis. Analisis di dalam tulisan ini menggunakan skema Evers (2008) tentang *knowledge hub*, *knowledge cluster*, dan *knowledge architecture*. Skema tersebut menunjukkan peran dan fungsi individu, lembaga, serta kegiatan mereka. Skema tersebut digunakan sebagai kerangka untuk membantu memaparkan dan mengeksplorasi kegiatan masa kini dalam kaitannya dengan masa lalu, dan untuk masa depan. Penulis mengadopsi kerangka Evers dengan beberapa penyesuaian, berdasarkan pada bahan yang ada. Tujuannya adalah mengangkat problematika, menganalisis menggunakan analisis jaringan, serta mengatasi keterbatasan yang ada.

Analisis *hub-knowledge* menggunakan skema di atas dengan melihat perkembangan P2KK, menggunakan katalog penerbitan buku dari tahun 2005 hingga 2015 dan LKJ (Laporan Kinerja) P2KK 2016. LKJ adalah rekam jejak dari kegiatan penelitian maupun kegiatan akademis lainnya dalam satu tahun anggaran, sedangkan katalog merekam perkembangan buku yang masuk ke ruang publik. Laporan kinerja, dahulu disebut sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), merupakan laporan tahunan tentang perkembangan dan dinamika kegiatan, yang juga mencakup capaian dalam bidang akademis. Di dalam laporan ini, kita bisa melihat kontribusi di dalam sitasi, presentasi di seminar dalam dan luar negeri, bimbingan akademis seperti tesis dan disertasi, serta penerbitan buku dalam pengembangan kompetensi individual.

Setiap tahun LIPI menghasilkan banyak laporan penelitian dalam berbagai versi, yang saat ini terdapat dorongan untuk menerbitkan di dalam bentuk buku dan *policy paper*, sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* yang berbeda-beda. Selain sebagai pertanggungjawaban akademis, buku dan jenis terbitan lainnya merupakan akuntabilitas lembaga terhadap publik. Penerbitan buku berkembang dari stensilan yang tebal dan berat pada masa tahun 80-an, hingga menjadi cetakan buku seperti yang kita ketahui saat ini. Masalah yang dihadapi oleh kegiatan penerbitan, tidak hanya berkaitan dengan urusan distribusi buku yang masih terbatas, tetapi juga bentuk buku yang perlu ramah pembaca. Dengan demikian, letak permasalahannya adalah sejauh mana hasil kegiatan akademis tersebut berkontribusi pada jejaring keilmuan yang ada. Pencetakan buku harus berjuang dalam konteks

pembiayaan, karena jumlah dananya tidak bisa menunjang penerbitan buku secara profesional. Perubahan ini terlihat pada perubahan desain sampul dari yang sederhana menjadi yang “ramai” dengan berbagai ilustrasi. Selain itu, pembuatan buku dengan penerbit korporat LIPI Press sangat dianjurkan, selain membuka kesempatan untuk menerbitkan melalui penerbit lainnya.

Peran Cendekia

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa cendekia berperan penting dalam mendefinisikan negara bangsa yang berhadapan dengan penjajah Belanda. Tulisan berjudul *Kalau Saya Seorang Belanda (Als ik eens Nederlander was)*², karya Suwardi Suryaningrat, merupakan salah satu contohnya (Anderson, 2006; Dhakidae, 2003). Para cendekia merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang berposisi, memihak, dan melihat melalui kacamata negara bangsa pembentukan Indonesia. Mereka mulai dari pertanyaan-pertanyaan tentang kolonialisme dan mengapa perlu merdeka. Posisi ini tidak asing, dengan menggunakan konsep intelektual organik dari Gramsci (1971), Dhakidae menggambarkan bahwa cendekia dianggap berperan justru jika mereka memihak. Dari sisi ini wacananya menjadi membingungkan. Contoh yang paling jelas di dalam konteks ini adalah pembentukan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang dianggap merupakan cerminan sektarianisme (Dhakidae, 2003). Dalam kaitan ini Zed (2014) mengatakan bahwa pengkajian tentang Indonesia pada masa lalu berkaitan dengan “kebutuhan” pemerintah kolonial. Oleh karena itu, sebutan untuk itu adalah indologi. Kajian-kajian indologi cenderung multidisiplin, berubah-ubah, dan sangat kental dengan pendekatan sejarah ilmu bangsa-bangsa. Bahkan Mestika Zed menyatakan bahwa hasil-hasil kajian tersebut telah membuka kemungkinan dan peluang bagi Belanda untuk menjajah Indonesia.

²Isi tulisan ini adalah kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda yang menganjurkan rakyat negeri jajahannya memperingati dan merayakan kemerdekaan Belanda dari tangan Spanyol. Suwardi Suryaningrat menggugat keinginan pemerintah kolonial Belanda, dengan pertanyaan “Apa tidak malu menyuruh merayakan kemerdekaan kepada rakyat yang dijajah?”. Karena tulisan ini, Suwardi Suryaningrat dihukum buang, ke Belanda. Terima kasih kepada M. Hisyam yang telah mengingatkan pentingnya keterangan ini.

Vedi Hadiz (2017) menunjukkan bahwa ilmuwan berposisi terbawa oleh arus pembangunan. Pembangunan adalah diskursus dominan pada masa Orde Baru di mana kebutuhan pemerintah untuk mengejar ketertinggalan mempengaruhi kegiatan dan capaian akademis. Hadiz mengungkapkan bahwa pada masa pasca Orde Baru, pasar menentukan kegiatan dan kajian. Jika pada masa lalu pemerintah mengutamakan program pembangunannya, maka kemudian yang berkembang adalah kajian melalui LSM yang berposisi pada pemerintah dan kepentingan pasar (Hadiz, 2017; Dhakidae, 2003). Pada sisi lain, universitas menghadapi masalahnya sendiri. Para dosen menghadapi serangkaian beban akademis dengan mengajar mata kuliah dengan jam yang sangat panjang, beserta keharusan administratif mengisi borang-borang yang sangat banyak. Sehingga, menurut Hadiz, para dosen kehabisan waktu dan energi untuk melakukan penelitian dan pendalaman ilmu mereka. Pendalaman ilmu juga bermasalah karena ekspose pada pengajar terhadap perkembangan ilmu juga terbatas. Di lain pihak, para peneliti yang mayoritas adalah pegawai pemerintah, “cenderung” atau dapat disebut sebagai pembawa suara pemerintah.

Pada kenyataannya fungsi dan peran ilmuwan tidak sederhana seperti gambaran di atas. Rochman Achwan (2016) melihat perkembangan ilmu sosial melalui gambaran tentang peran akademisi sebagai aktor. Achwan menggunakan kategorisasi Buroway yang mendiskusikan *public sociology*, dan lainnya. *Public sociology* adalah

Public sociology brings sociology into a conversation with publics, understood as people who are themselves involved in conversation. It entails, therefore, a double conversation (Buroway, 2005).

Kutipan ini menggambarkan bahwa diskusi tentang *public sociology* merupakan refleksi terhadap kecenderungan kajian sosiologi yang menggarap diskusi teoritik dan metodologi. Selain itu, tulisan ini memaparkan bahwa perkembangan keilmuan tidak lagi memungkinkan untuk melihat ilmu sebagai menara gading semata. Fungsi ilmu sudah berkembang menjawab berbagai pertanyaan. Kritik membangun ini kemudian dikembangkan dengan melihat kegiatan para sosiolog yang dibagi seperti tabel di bawah ini. Meskipun mengambil ilustrasi melalui pengetahuan sosiologi, tetapi tabel tersebut merefleksikan posisi para akademis

secara umum. Diskusinya memperlihatkan kaitan antara perhatian keilmuan sosiologi terhadap masalah masyarakat, masalah perkembangan ilmu, dan juga kebutuhan dari birokrasi. Dalam hal ini, kategorisasi Buroway mendeskripsikan bahwa setiap perhatian sosiologis memperlihatkan fokus dan juga kebutuhan yang berbeda.

Tabel 1
Peran Sosial Ilmu Pengetahuan

| | <i>Kalangan Akademik</i> | <i>Kalangan Non Akademik</i> |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <i>Pengetahuan Instrumental</i> | <i>Profesional</i> | <i>Kebijakan</i> |
| <i>Pengetahuan Reflektif</i> | <i>Kritikal</i> | <i>Publik</i> |

Sumber: Buroway (2005) (terjemahan bebas penulis)

Sosiologi dapat dilihat sebagai kegiatan akademik sebagai pengajar dan juga kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yang disebut Buroway sebagai non-akademik, seperti mereka yang terlibat di NGO (Non-Government Organization). Selain itu, dalam konteks keilmuan, terdapat dua kecenderungan. *Pertama*, pengetahuan yang digunakan secara langsung menghadapi masalah, yaitu pengetahuan instrumental. *Kedua*, pengetahuan reflektif, ketika sosiologi digunakan untuk mengkritisi situasi, merenungkannya dan memikirkan masa depan.

Berdasarkan kecenderungan tersebut, para sosiolog yang bergerak di bidang pengajaran dan pendidikan disebut sebagai profesional. Kemudian sosiologi kritikal menggunakan perspektif untuk melihat kesenjangan antara konsep dan realitasnya. Mereka memposisikan masalah sosial dalam posisi-posisi kekuasaan. Kegiatan ini dimasukkan ke dalam kegiatan akademik, karena kajian kritis merupakan olah pikir dan realitas, yang bisa memiliki jarak terhadap masyarakat.

Lebih lanjut, sosiologi kebijakan adalah penggunaan sosiologi untuk mengatasi secara langsung masalah sosial yang berkaitan dengan aturan dan hukum dan berkaitan dengan kebijakan. Sosiologi kebijakan berusaha mengatasi masalah dan mencoba melihat dalam kerangka yang luas untuk menghindari adanya efek yang memarginalkan salah satu kelompok masyarakat.

Sementara itu, sosiologi publik merupakan penggunaan cara pandang sosiologi untuk berdialog secara langsung dengan masyarakat, untuk menjelaskan dan mendiskusikan perkembangan

dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Sosiologi publik memiliki posisi ekstra karena dia tidak hanya bergerak pada kebutuhan menyelesaikan masalah, tetapi juga memiliki kemampuan reflektif. Pola seperti ini menghendaki sosiologi untuk berkaitan dengan masalah dan tidak berdiam pada “menara gading” saja.

Dalam hal ini sosiologi memang digunakan oleh beberapa kalangan yang berbeda-beda dan penggunaan tersebut memiliki implikasi terhadap penyelesaian masalah dan meningkatkan perkembangan keilmuannya sendiri. Menurut Achwan, sosiolog di Taiwan merupakan salah satu contoh bagaimana kategorisasi-kategorisasi tersebut dapat bekerja secara bersama-sama, yang mengatasi kecenderungan masing masing aktor untuk berkiprah hanya pada ranah mereka masing-masing.

Jika menggunakan kata publik secara lebih luas, potensi perkembangan ilmu sosial di Indonesia menjadi lebih besar. Chua Beng Huat (2015) mengkritisi posisi akademisi dan kegiatan akademik di Asia yang cenderung menerapkan pendekatan teori dan metodologi yang dihasilkan oleh akademisi di Barat. Idealnya, para akademisi Asia perlu mengembangkan pendekatannya sendiri dan berkontekstualisasi dengan situasi sosial budaya masyarakatnya. Pendekatan yang mereka peroleh ketika belajar di Barat atau dari Barat kemudian berinteraksi dengan masalah sosial yang dihadapainya, sehingga menghasilkan pendekatan yang sesuai dengan konteks masyarakat “Timur”. Chua Beng Huat mengutarakan pentingnya, apa yang disebutnya sebagai, *inter-Asia referencing*, sebagai penghargaan terhadap capaian akademisi di tingkat lokal, tetapi pada saat yang sama juga tidak melupakan referensinya dengan akademisi di dunia global. Konteks seperti ini merupakan bagian dari perjuangan poskolonial, yang berposisi terhadap Barat, berefleksi terhadap dominasi pengetahuan dan aktivitasnya. Pemikiran Chua Beng Huat ini, merupakan konteks reflektif, seperti yang dibahas Buroway pada sosiologi publik. Bahkan, Chua Beng Huat menguatkan pandangan ini dengan menyodorkan apa yang perlu dilakukan oleh akademisi di Timur. Pemikiran seperti ini melihat keilmuan dalam konteks kekuatan dan kekuasaan, perlu ditanggapi dan digunakan sebagai bagian dari perkembangan keilmuan yang dapat dilakukan dan dilaksanakan.

Kepedulian terhadap perkembangan ilmu dalam kaitannya dengan masalah sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia juga menjadi pertanyaan kalangan akademisi di Indonesia. Salah satunya dipotret melalui buku yang berjudul *Ilmu Sosial di Indonesia, Perkembangan dan Tantangan* (Santoso, 2016). Buku tersebut terinspirasi oleh kebutuhan akan diskusi tentang perkembangan ilmu sosial, mengingat bahwa pada masa Orde Baru yang dilihat sebagai rejim yang represif, ternyata ilmu sosial berkembang. Perhatian ini juga dilakukan oleh ilmuwan sosial pada masa Orde Baru karena beberapa buku tentang perkembangan ilmu sosial berkaitan dengan kegiatan YIIS (Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial) dan HIPIIS (Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial). Tema-tema yang dibahas antara lain adalah “Etika Pembebasan” (1984) dan “Kemiskinan Struktural” (1980), “Kualitas Manusia Dalam Pembangunan” (1986), dan “Krisis Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan di Dunia Ketiga” (1984). Pada masanya diskusi seperti ini, mencerminkan kepedulian ilmuwan sosial terhadap masalah sosial dan juga pada perkembangan keilmuan sosial di Indonesia.

Pertanyaan historis muncul dengan alasan yang sederhana seperti mengapa ketika rejim Orde Baru yang disebut otoritarian, ilmu sosial berposisi dalam perkembangan dan pembangunan, tetapi malah seperti kehilangan jejaknya pada masa Orde Reformasi. Romantisme hubungan dan relasi *peer group* antarakademia pada masa Orde Baru dapat dilihat dari perkembangan dan kegiatan YIIS dan HIPIIS. Hal tersebut salah satunya direkam oleh M. Hisyam di dalam tulisan tentang pelatihan ilmu-ilmu sosial yang dilaksanakan oleh YIIS (Yayasan Ilmu Ilmu Sosial) yang mendapatkan para pengajar berkelas dunia (Hisyam, 2012). Kegiatan ini mencetak ilmuwan sosial, pada saat itu menjadi *critical mass*, di lembaga penelitian, universitas dan lainnya, yang kemudian berkibrah di dalam pengembangan ilmu sosial, sebagai ilmuwan, sebagai birokrat yang bertanggungjawab atas pengembangan ilmu sosial seperti rektor, kepala Badan Litbang, dan sebagainya, serta sebagai pegiat ilmu sosial, dalam tingkat lokal, nasional dan internasional. Mereka menjadi aktor yang berperan mengembangkan kegiatan atau aktivitas ilmu sosial. Mereka yang beruntung mendapatkan pendidikan di mancanegara, di Eropa, Australia maupun di Amerika, menjadi mediator kegiatan global dan kegiatan nasional.

Kemudian beberapa jawaban terhadap pertanyaan di atas terdapat di dalam buku “Paradigma Ilmu Sosial di Indonesia” (2017). Pengantar buku tersebut dibuat oleh Ignas Kleden dengan sangat bagus menyoroti pandangan dari Taufik Abdullah tentang ilmu pengetahuan di Indonesia. Taufik Abdullah membagi ilmu pengetahuan di Indonesia atas (1) *a system of scientific thought*, (2) *a branch of applied sciences*, dan (3) *a system of critical discourse* (Kleden dan Abdullah: 2017). Pembagian ini menurut Ignas Kleden terlihat pada program yang berkaitan dengan pembangunan dan bahkan cenderung pada konsep *social engineering* yang dikembangkan pada masa Orde Baru. Pada masa itu, Indonesia dan negara Dunia Ketiga lainnya sedang membangun masyarakat modern, sehingga kebutuhan akan *applied sciences* lebih menonjol dibandingkan dengan kedua bentuk lainnya.

Sementara itu, kajian dengan penekanan yang *critical*, menurut Kleden, tidak terbentuk. Hal itu karena ilmu yang berkembang memiliki kecenderungan sebagai elemen justifikasi pembangunan (Kleden dan Abdullah, 2017: Santoso, 2016). Selain itu, tentu saja karena suasana membangun kurang memberi ruang untuk kritik. Ulasan Kleden sangat mengena, tidak saja membuat pemetaan baik dalam konteks akademis perkembangan pengetahuan dan keilmuan sosial dan humaniora, tetapi juga memberikan pemetaan yang komprehensif tentang perkembangan yang terjadi di Indonesia.

Kembali kepada penjelasan Abdullah yang memperlihatkan bahwa ideologi pembangunan pada masa Orde Baru telah memberi warna terhadap berkembangnya *applied science* yang selalu dikaitkan dengan apa yang bisa disumbangkan oleh ilmu pengetahuan bagi masyarakat, patut dicatat bahwa sumbangan yang dimaksud adalah sumbangan langsung yang berkaitan dengan kebijakan atau program di lapangan. Sebagai akibatnya, ilmu dasar menjadi kurang berkembang. Abdullah melihat bahwa perkembangan selanjutnya (baca setelah Orde Baru) dari ilmu sosial adalah kajian yang tidak membedakan ketiga karakter di atas, dan melihatnya dalam hubungan yang saling berkaitan, sehingga sebenarnya terdapat kebutuhan untuk melakukan pemetaan dengan mempertimbangkan hal tersebut, untuk melakukan penilaian terhadap perkembangan ilmu sosial di Indonesia.

TaufikAbdullah (2007) juga mencatat adanya perubahan kebudayaan sebagai bagian dari perhatian para akademisi pada masa itu, dari tradisi lisan berupa “*petatah petitih*”, kemudian berubah menjadi tertulis. Masa tertulis tersebut merekam bagaimana anak-anak muda seperti Soekarno, Hatta, dan Cokroaminoto mengembangkan pemikiran mereka dengan mengkritik kebijakan atau konsep yang dikembangkan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Tulisan mereka muncul di dalam buku-buku yang kemudian dapat membangun perkembangan kesejarahan tentang Indonesia (Anderson, 2006). Dengan demikian, kita melihat bahwa penerbitan buku adalah langkah kebudayaan yang penting untuk didiskusikan dalam konteks yang lebih luas. Intinya adalah, pola kritisi sebagai cara berpikir pernah hadir dan mampu menghadirkan alternatif diskursus terhadap kolonialisme. Selain itu, kekuasaan menjadi bagian dari peran dan fungsi dari akademisi di Indonesia, sebagai bagian dari keterkaitan mereka terhadap publiknya.

Situasi Ilmu Sosial di Indonesia

Bagi Indonesia secara umum, produksi ilmu pengetahuan perlu mendapatkan perhatian penting. Zed melihat produksi ilmu pengetahuan sosial berubah dari tipe indologi pada masa kolonial menjadi developmentalis pada masa Orde Baru, tetapi pada saat ini perhatian terhadap sejarah sedang sangat lemah. Menurut Zed, tulisan-tulisan yang dihasilkan dikategorikan sebagai ahistoris (Zed, 2014). Evers dan Gerke (2005: 80-81) melihat bahwa pengetahuan tentang Indonesia lebih banyak dihasilkan oleh peneliti asing dibandingkan oleh peneliti Indonesia yang bekerja pada lembaga (penelitian) di Indonesia. Kelemahan tersebut terekam di dalam paparan statistik yang memperlihatkan kecilnya dana penelitian di Indonesia dan terdapat ketergantungan terhadap informasi dan pengetahuan global. Artinya peneliti Indonesia masih menggarap pendekatan yang diperoleh dari Barat dan pengembangan pengetahuan dari Indonesia sendiri masih terbatas. Kemudian kemampuan mereka terbelenggu dengan dukungan pendanaan yang kurang baik, yang mempengaruhi luasan dari perkembangan yang mereka hasilkan. Mengelola pengetahuan, menurut Evers dan Gerke, diawali dengan kemampuan untuk mendapatkan dan kemudian menerapkan dan selanjutnya memproduksi pengetahuan yang baru.

Situasi sosial perkembangan pengetahuan di Indonesia tidak sederhana, salah satunya adalah pengaruh kerjasama. Jika Evers dan Gerke melihat terbatasnya dana sebagai penyebabnya, Dhakidae melihat dari prosedur penelitian di Indonesia yang berdasar pada birokrasi pemerintah (Dhakidae, 2003: 760). Informasi tersebut diperoleh dari appendix yang menunjukkan ketelitian Dhakidae akan informasi yang penting, yang berisi skema proses penelitian yang dibuat oleh Taufik Abdullah. Prosedur tersebut menunjukkan bahwa isu penelitian diperoleh dari inisiasi kementerian melalui Dirjen (direktur jenderal) yang bersangkutan, yang menjadi prioritas program pemerintah yang diturunkan melalui Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional). Dari Bappenas, topik penelitian diserahkan pada lembaga penelitian dan litbang yang kemudian melakukan penelitian dan membuat laporan. Laporan diserahkan pada pihak pemerintah dan kemudian menggarapnya menjadi kebijakan. Prosedur ini digambarkan oleh Taufik Abdullah dalam tulisan tahun 1983, sehingga kita mendapatkan gambaran tentang mekanisme dan bersifat *forecasting*. Prosedur itulah yang digunakan pada masa itu. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Melly G. Tan (2012), misalnya, banyak berkaitan dengan pertanyaan dari pemerintah tentang program pemerintah, seperti nutrisi dan pembangunan. Penelitian itu sebetulnya melangkah lebih jauh dari perkembangan masyarakat seperti penelitian tentang satelit Palapa. Satelit Palapa merupakan intervensi perkembangan teknologi informasi yang mendahului perkembangan masyarakat di dalam adopsi teknologi. Ketika itu televisi masih menjadi barang mewah, tetapi dianggap sebagai medium penting untuk “mencerdaskan” bangsa, dan ketika itu pemerintah mengembangkan komunikasi dalam konteks negara kesatuan. Di banyak daerah, pemerintah memberi bantuan televisi untuk warga yang dapat ditonton secara bersama-sama di depan kantor kelurahan atau kecamatan.

Sejarah perkembangan keilmuan sosial di Indonesia berkaitan dengan kegiatan global, ketika hubungan ilmuwan sosial di Indonesia dengan mereka yang di manca negara sangat kuat dan sangat mempengaruhi. Dalam konteks ekonomi, pengaruh ini muncul pada jargon seperti adanya “Mafia Berkeley”, mengacu pada lulusan universitas tersebut dan pengaruhnya di Indonesia. Hubungan ini, untuk beberapa isu,

merupakan kegiatan yang memfasilitasi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu juga ada program seperti *Colombo Plan* yang mendorong atau mencari orang Indonesia dan dari negara lain, yang akan disekolahkan ke luar negeri. Menurut Zed, hal ini merupakan gambaran adanya perubahan orientasi ilmuwan sosial dari kontinental (baca Belanda) menjadi Amerika. Bahkan, Zed menggambarkan bahwa Indonesia adalah kawasan yang paling penting di Asia. Program ini menghasilkan pemikir ilmu sosial seperti Clifford Geertz, Ben Anderson, dan mempengaruhi perkembangan tokoh tokoh ilmu sosial di Indonesia.

Kerangka dalam Melihat Hubungan Kelembagaan dengan Knowledge

Seperti telah disebutkan, tulisan ini melihat dan mengamati perkembangan P2KK melalui kerangka Evers. Dalam konteks kelembagaan, Evers menunjukkan bahwa mengetahui potensi dan posisi serta peran aktor cendekia bagi lembaga sangatlah penting. Evers mengusulkan konsep seperti *Knowledge Hub*, *Knowledge Clusters*, dan *Knowledge Architecture* (hub-pengetahuan, kluster pengetahuan, dan arsitektur pengetahuan) untuk menilai sumbangan lembaga pada suatu kawasan di dalam perkembangan

keilmuan. Tabel di bawah ini diambil dari Evers (2008), yang digunakan untuk membantu memetakan kegiatan individual dan kelembagaan dari P2KK. Analisisnya barangkali tidak dapat menyamai Evers (2008). Namun, kerangka Evers dapat digunakan sebagai alat untuk memetakan dan menganalisis konteks internal dalam kaitannya dengan konteks eksternal lembaga.

Kerangka yang diajukan oleh Evers merupakan alat analisis yang melihat berbagai macam lembaga penghasil ilmu pengetahuan dalam kawasan analitik. Alat analisis ini membutuhkan data besar berupa hasil dan kegiatan akademis, serta hubungan yang berkembang di kawasan tersebut. Skema Evers yang besar ini tetap dapat digunakan dalam lingkup yang kecil sebagai langkah eksplorasi. Analisis ekplorasi inidilakukan melalui catatan kinerja P2KK (2017), dengan mendaftar dan mengelompokan organisasi yang terlibat di dalam pekerjaan dan kegiatan akademis. Tujuannya adalah untuk memetakan hasil kegiatan akademis yang dilakukan dalam konteks, satker yang dilihat sebagai *hub-knowledge*. Tabel di bawah ini menunjukkan definisi dan indikator dari skema Evers, ketika satker dapat diletakan dalam kategori hub.

Tabel 2
Struktur dan Kontribusi Kelembagaan dalam Produksi Ilmu Pengetahuan

| <i>Knowledge Hub</i> | <i>Knowledge Cluster</i> | <i>Knowledge Architecture</i> |
|----------------------------|---|---|
| <i>k-cluster</i> | <i>agglomerations of organisations emphasizing knowledge as output or input</i> | <i>Number of organisations per location</i> |
| <i>K-hub</i> | <i>local innovation systems that are nodes in networks of knowledge production and knowledge sharing</i> | <i>Number of knowledge workers and their products (patents, papers, software)</i> |
| <i>k-architecture</i> | <i>the structures and institutions of communication and the related type and intensity of knowledge flows</i> | <i>ICT governance regimes, regular meetings, k-sharing incentives</i> |
| <i>Epistemic landscape</i> | <i>areas of high or low knowledge intensity</i> | <i>Regional R&D expenditure, location of k-clusters and k-hubs</i> |

Sumber: Evers, (2008)

Analisis struktur ini melihat dari capaian kelembagaan dan bagaimana lembaga yang setara menghasilkan pengetahuan (Evers, 2008). *Hub* merupakan alat untuk membantu memetakan kontribusi lembaga. Evers memperlihatkan bahwa *knowledge hub*, *knowledge cluster*, dan *knowledge architecture* dapat menganalisis peran dan produksi ilmu pengetahuan di dalam analisis geospasial dari keberadaan lembaga lembaga tersebut. Analisis hub pengetahuan merupakan analisis awal dari serangkaian analisis

lainnya, yang dapat dilakukan setelah beberapa syarat diketahui. Analisis hub dapat berdiri sendiri, meskipun di dalam analisisnya dikaitkan dengan analisis lainnya. Hal ini dilakukan mengingat kebutuhan untuk melihat posisi dan keuntungan (*comparative advantage*) dari lembaga dan keberadaan data.

Selain itu analisis tersebut di atas merupakan analisis makro dengan data yang besar namun dalam tulisan ini difokuskan pada

peran lembaga yang akan dilihat dalam konteks *knowledge hub* yaitu sebagai berikut.

“Knowledge hubs are local innovation systems that are nodes in networks of knowledge production and knowledge sharing. They are characterised by high connectedness and high internal and external networking and knowledge sharing capabilities. As meeting points of communities of knowledge and interest, knowledge hubs fulfil three major functions: to generate knowledge, to transfer knowledge to sites of application; and to transmit knowledge to other people through education and training” (Evers, 2008).

Knowledge hub melihat lembaga penelitian sebagai bagian dari sumbu-sumbu produksi ilmu pengetahuan dan jejaringnya. Di dalam analisisnya, dilihat kegiatan internal maupun eksternal, dengan tiga fungsi utama yaitu menghasilkan pengetahuan, mentransfernya di dalam penggunaan, dan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan. Konsep ini membantu melihat posisi dari P2KK melalui aktivitas dan hasil kegiatan para penelitiannya. Selain itu, konsep ini juga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi LIPI, yaitu mengembangkan dan mendiseminasikan ilmu pengetahuan. Pendekatan seperti ini melihat konteks kelembagaan yang terpisah dari analisis kritis terhadap substansi yang dikembangkan oleh aktivitas dan hasil kegiatan lembaga, walaupun di dalam tulisan ini beberapa komentar dan kritik tetap digunakan.

Pentingnya Buku

Berkaitan dengan hub pengetahuan, kluster pengetahuan dan arsitektur pengetahuan seperti di atas, buku dan kegiatan sosial merupakan bentuk dari bangunan pengetahuan. Bagian ini memperlihatkan bangunan tersebut melalui buku. Pentingnya buku, dibahas juga oleh Anderson (2006) yang menggambarkan tentang konsep *“imagined communities”*. *Imagined communities* adalah naskah tentang nasionalisme, akan tetapi ada beberapa hal penting yang diperlihatkan dan dapat dikaitkan dengan buku sebagai salah satu medium pengembangan *“shared knowlege”*, yang berkembang melalui surat kabar dan novel. Dengan tampilnya berita atau pemikiran di dalam medium-medium tersebut tidak akan hilang dan dapat muncul dalam kesempatan lain. Selain itu, terbitan tersebut merupakan representasi

dari pasar yang mengonsumsinya (Anderson, 2006: 33-34). Di dalam bahasanya, Anderson mengatakan bahwa *“The book, however – and here it prefigures the durables of our time – is a distinct, self contained object, exactly reproduced on the large scale”* (Anderson, 2006: 34).

Dalam skala yang lebih terfokus, Jeroen (1998) menggunakan terbitan dari penerbit Islam di Indonesia untuk menjelaskan perubahan sosial dalam konteks pengetahuan keberagaman yang terjadi. Di dalam paparannya, sebagai pioner, di Indonesia penerbit buku-buku Islam adalah Bulan Bintang yang memberikan porsi pada penulis Indonesia. Pada masa Orde Baru, berkembang penerbit Mizan yang banyak menterjemahkan pemikiran Islam dari luar Indonesia.

Gambaran lain tentang pentingnya buku di Indonesia, diperoleh dalam fragmen-fragmen, seperti yang diceritakan di dalam sejarah Penerbit Obor (2017). Penerbit Obor merupakan penerbit dengan fokus pada ilmu sosial termasuk menerbitkan buku-buku terjemahan. Sejarah Penerbit Obor memperlihatkan bahwa Indonesia pernah masuk di dalam indikator darurat buku. Indikator tersebut kemudian menghasilkan program penerbitan buku dalam jumlah yang dianggap mencapai *“critical mass”* juga untuk ilmu sosial. Sebagai ilustrasi, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI), misalnya, terdapat mata kuliah seperti Sistem Sosial, Sistem Politik, Sistem Hukum, dan Sistem Budaya, dan bacaan wajibnya salah satunya mengacu pada buku-buku terbitan Obor. Pada saat itu mereka yang mengajar mata kuliah tersebut, merupakan bagian dari *peer group* yang terlibat baik langsung maupun tidak dengan YIIS dan HIPIIS. Dalam konteks yang sejamin, sejarah LP3ES menghasilkan gambaran yang serupa, ketika Prisma menjadi rujukan penting dari isu dan tema yang dibahas di dalam mata kuliah tersebut (Dhakidae, 2003).

Buku merekam perubahan sosial. Dalam hal ini, terlihat pentingnya mendefinisikan kembali posisi akademisi, sebagai pendorong perkembangan ilmu sosial. Di dalam perkembangan ilmu sosial terdapat dua fungsi buku, yang pertama adalah untuk melacak *orthodox ideas* dan yang kedua adalah untuk menyuarakan ide yang baru (Hobsbawn, 2013: 8). Obor, LP3ES, dan juga YIIS dan HIPIIS, pada masa Orde Baru merupakan institusi yang

penting di dalam pengembangan ilmu sosial. Sebagai ilustrasi pengalaman sebagai mahasiswa sosiologi pada tahun 80-an di UI terdapat mata kuliah dengan judul utama adalah Sistem yang dilihat dari isu sosial, budaya, politik, hukum. Mata kuliah tersebut memiliki serangkaian bahan bacaan (wajib) termasuk buku dengan isu Indonesia yang umumnya diterbitkan oleh Obor. "Kemiskinan di Perkotaan" (1993) tulisan Parsurdi Suparlan adalah salah satu contohnya.

Peer group ini penting bagi Obor sebagai penerbit dan juga para akademisi sebagai penggunanya. Beberapa buku yang diterbitkan Obor merupakan buku teks, akan tetapi kita melihat kaitan antara buku teks tersebut dengan penggunanya di universitas. Di dalam ulang tahun Obor yang ke 49 pada tahun 2017, Ignatius Haryanto menceritakan aktivitasnya ketika menjadi mahasiswa, dengan membuat resensi buku-buku bermutu yang diterbitkan Obor. Salah satu tugas P2KK-LIPI secara umum adalah mengembangkan komunitas ilmiah, melalui kegiatan siaran akademik melalui buku. Hal ini berkaitan dengan minat dan kemampuan membaca cepat yang dimiliki oleh *peer group* ini, serta dukungan bahwa membangun komunitas akademis penting adanya. Selain itu, menekankan pada para mahasiswa bahwa buku ini perlu dibaca merupakan sesuatu yang penting untuk dikembangkan. Beberapa kalangan mendahulukan terbitan dari luar negeri dengan alasan kebaruan dan juga otoritas keilmuan yang dimiliki oleh penulisnya. Tentu ini benar, karena terdapat kesenjangan dari konsep-konsep yang sudah berkembang pesat, dengan kecepatan kita mengakses informasi. Akan tetapi hal ini merupakan salah satu tantangan di dalam pengembangan pengetahuan di Indonesia.

LIPI sebagai Sebuah Konteks Pengetahuan

Berkaitan dengan pandangan di atas, maka perbedaan tentang kepentingan *public*, *academic*, dan *beuracrautic* yang muncul di dalam pembagian *basic* dan *applied* menjadi menarik karena dapat berfungsi ganda dan ada pula yang berjalan berdampingan. Diskusi tentang hal ini menarik karena LIPI sendiri mencanangkan bahwa peran ilmu adalah bisa *science for science*, *science for stakeholders*, dan *science for scientific community*, yang pembagiannya menjadi sulit jika dipilah-pilah dengan *rigid*. *Science for science* menunjukkan kegiatan peneliti yang tercurah pada perkembangan keilmuannya, *science for stakeholders* adalah

peneliti mampu memberikan jawaban terhadap kebutuhan *stakeholders*-nya, dan *scientific community* adalah bagian dari diseminasi dan tanggungjawab akademik terhadap *peer group* keilmuan masing-masing. Tantangan peneliti dan satuan kerjanya (satker) adalah menyeimbangkan antara ketiga kepentingan tersebut.

Bagaimana keterkaitan ketiga hal di atas dapat dilihat dari pengalaman tentang proses penelitian dan perkembangan kompetensi individu dapat diperoleh dari informasi Melly G. Tan. Berdasarkan paparan tentang penelitian yang pernah dilakukan, tema tentang pembangunan, merupakan bagian dari sejarah (Melly G. Tan, 2012). Tulisan reflektif Melly G. Tan merupakan bagian dari pembahasan kegiatan P2KK-LIPI khususnya dan di LIPI pada umumnya (Santoso, 2012). Berdasarkan paparannya, kegiatan penelitian dapat dilihat dari kegiatan yang berkaitan dengan program pemerintah, seperti nutrisi dan dampak pembangunan pada masyarakat, kemudian kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi berkaitan dengan *networking* internasional yang dikembangkan dan kajian tentang etnis Cina yang merupakan bagian dari keparakan yang bersangkutan.

Barangkali hal yang menarik adalah cerita Melly G. Tan tentang komentar Harsya Bachtiar (Melly G. Tan, 2012: xi) bahwa kajian etnis Cina yang sebaiknya tidak dilakukan oleh Melly G. Tan secara eksklusif karena dapat membatasi kajiannya sendiri dari perkembangan ilmu yang lebih luas. Nasehat tersebut diperhatikan oleh Melly G. Tan, walaupun sebenarnya kegiatan tentang kajian Cina yang membawanya sebagai *fellow* di Kyoto (Santoso, 2012: xi). Saat ini kajian etnis Cina dikembangkan oleh Thung Ju Lan yang mampu mengaitkannya dengan jejaring internasional dalam *International Workshop "Making Global Trajectories of Chinese Diaspora Studies in Asia"*, 2017. Sebagai sebuah kajian yang penting, P2KK membutuhkan revitalisasi dari kajian Cina sehingga isu ini bisa terus berkembang.

Dalam konteks kelembagaan, Dhakidae mencatat pandangan pemerintah terhadap ilmu sosial melalui kutipan sambutan Presiden Soeharto pada peresmian gedung LIPI. Kutipan lengkapnya adalah sebagai berikut.

"Penelitian bidang sosial hendaknya makin banyak mendapatkan perhatian kita, karena pada akhirnya kemampuan manusia dan

perkembangan masyarakat yang terencana dan terarah akan menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan... [K]eberhasilan pembangunan juga membawa masalah masalah baru yang perlu dipecahkan bersama. Kemajuan pembangunan tidak saja membawa perbaikan hidup, tetapi juga membawa harapan harapan baru, tantangan-tantangan baru dan bahkan juga persoalan-persoalan baru” (Dhakidae,2003: 331).

Ketika itu, menurut Dhakidae, peran LIPI adalah sebagai pemandu perkembangan yang berdasar pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Dhakidae, 2003: 332). Kata pemandu perkembangan dan seterusnya tersebut merupakan kutipan lanjutan Dhakidae terhadap kata-kata Soeharto. Sebagai konsekuensinya perkembangan ilmu sosial sangat berat karena “...otonomi ilmu dan riset praktis tidak ada” (Dhakidae, 2003: 333).

Apakah seperti itu pada kenyataannya, terutama ketika peran pemerintah mengontrol ilmu pengetahuan melalui penelitian pesanan sudah menurun drastis? Hal ini dapat dilihat dari proses pengajuan penelitian. Prosedur pengajuan penelitian berubah setelah reformasi dengan berubahnya peran dari Bappenas. LIPI dapat mengelola keuangannya dan kajian yang ingin dikembangkannya. Oleh karena itu, di dalam tema-tema penelitian setelah tahun 1998 terdapat beragam ide. Pengelolaan keuangan yang mandiri memberikan kebebasan dan meningkatkan kreativitas dari penelitiannya, meskipun terdapat isu-isu yang masih bertahan. Tema seperti hubungan industri dengan masyarakat disekitarnya, merupakan salah satu contoh dari tema yang bersinambungan dari penelitian pada tahun 80-an.

Peneliti sebagai sebuah kelompok sudah berusaha untuk mengkritisi diri mereka sendiri. Pada tahun 1998, peneliti LIPI menginisiasi petisi terhadap kekuasaan Orde Baru. Dikomandani oleh beberapa peneliti politik-LIPI, pada 18 Mei 1998 mereka pergi ke DPR, dan Presiden Soeharto lengser pada 21 Mei³. Meskipun diwakili oleh 19 peneliti politik LIPI, petisi tersebut memperlihatkan bahwa peneliti sebenarnya berposisi terhadap kekuasaan. Peristiwa itu tidak hanya peristiwa politik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana peneliti bisa berposisi ketika melihat situasi yang genting.

³Terima kasih pada Adriana Elizabeth atas informasinya.

Paparan ini memperlihatkan bahwa akademisi di lembaga pemerintah, menjadi bagian dari proses kekuasaan yang terjadi. Di dalam profesinya, para akademisi ini menggunakan basis keilmuan, sehingga tidak semata-mata mengikuti kata pemerintah, terlebih lagi mereka melakukan penelitian pada sisi yang berbeda dari yang dilakukan pemerintah. Hubungan kekuasaan juga berubah sesuai dengan situasi yang ada, sehingga kebebasan peneliti mengemukakan ide dan melaksanakan di dalam proses penelitian yang ada, terlihat dari beragamnya kajian yang ada. Kesulitan yang terjadi adalah di dalam kedalaman atau keluasan dari kajian yang dilakukan, peneliti terpaksa melakukan penyesuaian diri karena dukungan finansial yang terbatas.

P2KK sebagai Sebuah Cluster Perkembangan Ilmu Sosial

Latar belakang sejarah kelembagaan ilmu sosial di LIPI dimulai dari masa Leknas (Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan Nasional) dan LRKN (Lembaga Riset Kebudayaan Nasional), yang berdiri tahun 60-an. Pada 1986 terjadi re-organisasi yang melanda Leknas dan LRKN. Dari situ kemudian terbentuklah 4 (empat) satuan kerja, (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB), (2) Puslitbang Politik dan Kewilayahan, (3) Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, (4) Puslitbang Ekonomi. Pada tahun 2001 nama Puslitbang diubah menjadi Puslit saja, dan satuan kerja bertambah yaitu dengan ditambahkan satu Puslit, yaitu PSDR. Perubahan ini terjadi karena perubahan kelembagaan pada tingkat LIPI. Di dalam proses ini, terjadi kritik terhadap perubahan nama. Karena publik sudah kenal dengan nama ini dan menjadi agak bingung ketika namanya berubah. Selain itu, fokus-fokus kajian juga berubah. Dalam hal ini perlu membaca kembali kebutuhan akan re-organisasi yang barangkali cenderung pada kepentingan birokrasi dibandingkan dengan kepentingan ilmu pengetahuan. Namun, hal ini tidak dibahas di dalam tulisan ini karena perbedaan fokus.

Ketika masih bernama PMB-LIPI (Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan), perkembangan keilmuan ditampung pada bidang, sehingga terbentuk 2 bidang, yaitu bidang Dinamika dan bidang Religi dan Filsafat. Baru kemudian pada tahun 1986 ditambah satu bidang lagi, yaitu bidang Hukum dan

Masyarakat. Untuk menjalankan fungsinya, di PMB-LIPI dibuat fokus kajian yang disebut sebagai balai; Balai Litbang Religi dan Filsafat dan Balai Litbang Sistem dan Dinamika Sosial Budaya (BSDSB). Pada tahun 2002, penamaan balai diubah menjadi bidang, penamaan bidang menjadi Bidang Dinamika Masyarakat, dan ditambah bidang Hukum dan Masyarakat. Pada 2004 bidang Religi dan Filsafat diganti menjadi bidang Humaniora⁴. Tahun 2015 PMB-LIPI berubah menjadi P2KK LIPI. Pada proses perubahan tersebut, penekanan terhadap kebutuhan diseminasi, mengubah bidang yang awalnya berdasar pada pengembangan keilmuan kemudian dihapuskan dan menjadi kelti (kelompok penelitian) dan bidang memfokuskan pada fungsi Pengelolaan Diseminasi dan Hasil Penelitian (PDHP). Diskusi tentang kebutuhan pengelompokan berdasarkan kelti mengemuka, mengingat perkembangan isu dan tema yang bergerak dengan cepat. Selain itu, di dalam proses penelitian, telah dibahas kebutuhan untuk mengembangkan analisis multidisiplin, mengingat kompleksitas dari masalah dan kebutuhan Indonesia akan analisis yang komprehensif.

Pengembangan Kelompok Penelitian (Kelti) atau Kekeltian untuk menampung pengelompokan multi disiplin. Proses pengelompokan ini cukup ramai karena variasi disiplin keilmuan. Namun, akhirnya di P2KK tersepakati adanya 4 kelti, yaitu Kelti Agama dan Filsafat, Kelti Ekologi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat (ESKM), Kelti Hukum dan Masyarakat, serta Kelti Multikulturalisme. Di kelti, peneliti dari berbagai disiplin bisa terlibat, tetapi mereka bertanggungjawab untuk tema tertentu. Misalnya, kelti Agama dan Filsafat membawahi penelitian agama yang terdiri dari isu pluralitas-minoritas, syariah Islam, dan agama lokal, kelti ESKM merupakan gabungan dari tema-tema besar seperti hutan, maritim, dan perkotaan, kelti Multikulturalisme menggarap tema Media Sosial, Bahasa, dan STS (*science, technology and society*), dan kelti Hukum dan Masyarakat menggarap isu Hak EKOSOB (Ekonomi Sosial dan Budaya).

Pada tahun 2017 terjadi upaya menyinergikan kegiatan melalui kelti-kelti di P2KK-LIPI untuk menggarap isunya yang dikaitkan dengan kebangsaan, yang menghasilkan 2 FGD. *Pertama*, gabungan Kelti Multikulturalisme dan Agama dan Filsafat (Thung Ju Lan, *et.al.*,

2017) pada 18 Oktober 2017 dan *kedua*, kelti ESKM dan EKOSOB pada 19 Oktober 2017 (Sudiyono, *et.al.*, 2017). Dua FGD tersebut menghasilkan beberapa masukan, antara lain adanya kebutuhan untuk mengaitkan antara penelitian empiris dari lapangan dengan kebutuhan abstraksi yang lebih tinggi. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memaparkan perkembangan keilmuan dari kajian. Kedua hal ini menjadi penting karena di Indonesia terdapat perubahan struktur sosial dan data tentang hal tersebut tersebar dan sangat beragam.

Oleh karena itu, situasi di dalam hubungan antarindividu dan lembaga yang tampaknya bermasalah sebenarnya dipengaruhi oleh perubahan struktur sosial yang belum dieksplisitkan. Ada beberapa usulan yang muncul di dalam diskusi tersebut, di antaranya adalah perlunya membaca kembali kajian etnografi tentang Indonesia, untuk memperlihatkan perubahan yang sudah terjadi (Afiff, 2017). Perubahan ini penting karena, pada umumnya, pada tingkat masyarakat sudah terjadi hubungan sosial multikultur yang saling memahami. Masalahnya ternyata terdapat pada representasi politik pada tingkat nasional yang berimbas pada politik tingkat lokal dan memiliki dampak pada tingkat global. Oleh karena itu, dalam hal ini, kajian yang dilakukan diharapkan memberi usulan dalam tingkat rekomendasi untuk mengatasi atau memberikan alternatif solusi. Selain itu, ada beberapa konsep yang muncul dari FGD tersebut, seperti pentingnya menggarap kembali konsep negara; dominasi agama; sejarah; serta globalisasi sebagai serangkaian elemen yang sulit dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Dalam konteks memahami kajian dan pemetaan terhadap fokus dan perhatian, P2KK dilihat sebagai sebuah *hub* di dalam kancah kajian ilmu sosial di Indonesia. Tulisan ini menggarap hasil kajian dan tulisan yang terekam di dalam kegiatan, terutama buku, meskipun ada bentuk kegiatan lain seperti video. Dalam hal ini upaya analisis dilakukan melalui kategorisasi dari judul buku sejak tahun 2000-2015; melalui Katalog Buku Hasil Penelitian (2017) dan juga melalui LKJ. Melalui LKJ terlihat kerjasama yang tercatat adalah seperti di dalam tabel di bawah ini yang menunjukkan indikator *Knowledge Cluster* yang digunakan baru memperlihatkan kecenderungan, walau sudah terlihat sebarannya. Pada dasarnya kegiatan akademis masih bertumpu pada kegiatan

⁴Keputusan Kepala LIPI No 1151/M/2004

individual, bahkan dalam kegiatan *public lectures*, mereka yang hadir merupakan bagian dari jejaring individu yang kebetulan bertemu dan membuka peluang untuk memberikan masukan ke kalangan akademik melalui lembaga. *Public lectures* merupakan kegiatan yang dapat dikembangkan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan cara ini, informasi atau perkembangan ilmu dapat lebih cepat dibandingkan keterlambatan, yang umum terjadi dalam kisaran 5-10 tahun dari sebuah konsep. Paparan Suraya Afiff (2017) setelah melihat paparan tentang konsep *tragedy of the commons*, yang masih digunakan sebagai konsep utama, walaupun konsep tersebut telah mendapatkan kritikan disebabkan karena adanya pengalaman yang berbeda.

Di bawah ini adalah tabel yang diperoleh dari daftar tentang kerjasama P2K LPI. Di situ terlihat bahwa daerah atau individu atau organisasi yang bekerjasama dengan P2KK umumnya berada di Jakarta. Kemudian beberapa tim penelitian sudah dapat mengembangkan kerjasama dengan pemerintah daerah. Beberapa diantaranya diinisiasi oleh tim Bahasa yang ketika itu merupakan kegiatan PN atau Prioritas Nasional, yang memiliki lebih banyak dukungan finansial yang mendukung kreativitas mereka. Penelitian bahasa Pagu mampu membangkitkan kesadaran etnis yang ada di tempat itu melalui kegiatan penelitian yang dilakukan, melalui ketua adatnya, Ibu Ida. Tim penelitian di Kao berhasil membuat buku ajar. Kegiatan lainnya menghasilkan kasus, video, dan cerita anak. Cerita anak ini ditulis dalam dua bahasa yaitu bahasa etnis yang bersangkutan dan bahasa Indonesia.

Tabel 3
KerjasamaKelembagaan P2KK

| Pengelompokan lembaga | Kluster Pengetahuan | Arsitektur Pengetahuan |
|----------------------------------|---------------------|--|
| Kementrian | 15 | Jakarta |
| LSM, Pokja, asosiasi, foundation | 21 | Jakarta, daerah, |
| Litbang sejenis | 7 | Jakarta |
| Pemerintah daerah (kabupaten) | 2 | Daerah penelitian |
| Universitas dalam negeri | 23 | Jakarta, Yogyakarta, Purwokerto, Banjarmasin |
| Universitas luar negeri | 7 | Amerika, Jepang, Singapur |

| | | |
|--------------------|----|-----------------------------------|
| Jurnal | 16 | Jakarta, Bandung, Bali, Palembang |
| Media (media baru) | 5 | Jakarta |

Sumber: Diolah dari LKJ P2KK (2016)

Data dari tabel tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan terbesar masih bertumpu pada kegiatan akademis, seperti menjadi narasumber di kementerian, LSM, jurnal, dan universitas dalam dan luar negeri. Kegiatan dengan universitas luar negeri, terutama adalah *public lecture*, dan hanya beberapa yang berupa peserta aktif dalam kegiatan seminar dan menjadi *fellow*. Aktivitas untuk terlibat pada seminar-seminar dengan tema spesifik berkaitan dengan *peer group* yang dikembangkan individu dan belum menjadi tujuan dari kelembagaan. LKJ sebenarnya merupakan laporan tahunan, tetapi data tahun 2016 tidak dipaparkan pada kesempatan ini karena dokumentasi belum lengkap.

Katalog sebagai data dan informasi lainnya diperlakukan sebagai data, sehingga ada dua hal besar yang dilakukan untuk menganalisisnya. *Pertama*, membuat pengelompokan berdasarkan *cross cutting issues* dari beberapa tema penelitian. *Kedua*, menggarap isu-isu yang digunakan untuk membuat analisis lanjutan, walaupun merupakan paparan kasus tertentu. Katalog ini dibuat dengan upaya yang keras karena dokumentasi yang kurang tertata dan proses perubahan kelembagaan dan juga perpindahan kantor yang membuat data tercerai berai. Pengelompokan yang diperoleh dari katalog dibuat berdasarkan tulisan tunggal, berdasarkan isu seperti penelitian kelompok marginal yang terdiri dari isu perempuan, disabilitas, anak jalanan, minoritas agama, isu perkotaan, isu ekologi, isu keagamaan, isu bahasa, isu kebudayaan, isu komunikasi dan media, serta isu pembangunan. Pada 29 November 2017 telah diadakan acara ekspose hasil kegiatan yang dinamakan "Temu Mitra". Dalam acara ini ditampilkan pameran hasil-hasil kegiatan P2KK melalui poster judul buku dan foto. Kegiatan ini menampilkan Dr. Yanuar Nugroho, Deputy II Kepala Staf Kepresidenan yang menangani kajian dan pengelolaan program prioritas yang memberikan kuliah umum tentang prioritas Indonesia (Kompas, 30 November 2017). Temu Mitra merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjadi ruang diskusi yang mengemukakan

kegiatan dengan harapan dapat berdialog dengan *stakeholders*. Melalui dialog diharapkan pengembangan kegiatan akademis yang lebih terfokus dan mampu menjawab pertanyaan dari *stakeholders*.

Sementara itu, dalam konteks *hub*, kegiatan P2KK dapat disarikan dalam tabel di bawah ini. Tabel itu memperlihatkan antara lain nama peneliti yang tersitasi cukup berimbang antara perempuan dan laki-laki.

Tabel 4
Jejaring Pengetahuan Berdasarkan pada Kegiatan Akademis

| Sistem, hub kerjasama dan <i>knowledge sharing</i> | Kluster Pengetahuan | Arsitektur Pengetahuan |
|--|---|--|
| Membangun kesadaran | Bahasa sampai pada penyediaan bahan untuk daerah; Isu agama, berjejaring secara individual dalam dan luar negeri, walaupun isu sudah menjadi isu di dalam lembaga; berjejaring di dalam negeri, gender, maritim, perkotaan, berjejaring di dalam pengajaran dan aktivitas akademis -media, berjejaring dalam dan luar negeri dalam isu spesifik – etnisitas- kajian Cina; | Buku: Tematik 9, terbitan eksternal 8, <i>local wisdom</i> buku cerita anak, bahan Mulok, kumpulan peribahasa Sitasi: perempuan 12, laki laki 21 |
| Kegiatan akademis | Pendanaan dan kebutuhan keilmuan menjadi alasan untuk kerjasama akademis | Menjadi dewan pakar dan kegiatan sejenis 8 orang |
| Kegiatan asosiasi | Dilakukan secara individual berdasarkan kepentingan yang dikembangkan individu bersama sama dengan asosiasi | Kepengurusan dalam organisasi 2 orang. Individu yang memiliki kegiatan asosiasi, merupakan individu yang memberikan perhatian kepada kebutuhan kerjbersama |
| | Kegiatan dengan konteks masyarakat cenderung berkaitan dengan kepedulian, dan hasil riset dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Masyarakat terlibat di dalam pengembangan isu dan tema penelitian | Kepengurusan dalam kegiatan ilmiah 3 orang |
| Karya tulis ilmiah | Lembaga memfasilitasi penerbitan jurnal dan program penulisan KTI | Bagian dari buku 27; jurnal nasional 19; jurnal internasional 7; prosiding nasional 25; prosiding internasional 6 |
| Indeks | Perlu fasilitasi bagi peneliti untuk masuk ke laman laman seabgai akses pengukuran indeks dunia global seperti akun <i>google scholar</i> | Terindeks global sitasi 8 orang, impact 3 orang |

Sumber: diolah dari LKJ P2KK 2016.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa di dalam kegiatan sudah mulai terlihat adanya kecenderungan walaupun masih terbatas pada kegiatan di dalam danluarnegeri. Kegiatan di luar negeri seperti bekerjasama dengan lembaga lain terkait dengan isu spesifik seperti agama, kajian etnisitas seperti etnis Cina, dan maritim. Representasi dalam konteks kegiatan di luar negeri masih terbatas, sehingga masih bertumpu pada individu dan isu tertentu yang menjadi bahan diskusi dan program, di beberapa kalangan *peer group*. Dengan demikian terlihat bahwa isu dan *peer group* menjadi penting di dalam pengembangan kegiatan dan kontribusi akademis dan kegiatan berjejaring lainnya.

Terutama dalam penerbitan jurnal internasional, sangat berkaitan dengan jejaring melalui *peer group* internasional.

Potensi kerjasama yang kondusif untuk dikembangkan terlihat di beberapa titik diantaranya adalah pada isu agama, gender, perkotaan, maritim, dan etnis Cina. Meskipun demikian, terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan seperti kajian Cina yang sangat spesifik dan di lembaga hanya ada beberapa orang saja yang menjadi pemerhatinya. Dalam isu Cina, Thung Ju Lan melakukan workshop international dengan tema “*Making Global Trajectories of Chinese Diaspora Studies in*

Asia". Sementara itu, isu agama sudah lebih luas cakupannya, tetapi masih harus membuka diri dengan mengaitkan kegiatan berjejaring antarlembaga. Kegiatan ini tidak hanya penting untuk memfokuskan kajian tetapi juga menjadi isu dan fokus yang dapat saling melengkapi. Kegiatan bertema agama baru saja bekerja samamenggarap peran Hadrami di dalam seminar internasional, bekerjasama dengan *The Hadhramaut Center for Historical Research Documentation and Publication*, Menara (*Study and Research Center of Arab Descents in Indonesia*), dan Balai Litbang Agama Jakarta, Kementerian Agama RI. Pengalaman kajian penerapan syariah Islam, menunjukkan bahwa analisis berkaitan dengan rezim seperti ASEAN atau dunia global (Santoso, belum terbit). Pengaruh ini tidak dapat dihindari dan bahkan harus masuk menjadi salah satu elemen di dalam penelitian.

Dari skema *knowledge sharing*, data yang digunakan sebagai wahana eksplorasi tidak memungkinkan membuat pemetaan dan analisis dalam konteks *knowledge architecture* dan juga *epistemic landscape* yang akan menjadi agenda selanjutnya. Meskipun demikian, dari *cluster* dan *hub*, kita bisa memetakan kebutuhan dan tantangan yang harus dikembangkan secara bersamaan dengan melihat kegiatan dan jejaring dengan lembaga lain. Dalam skala terbatas, *knowledge sharing* dilakukan oleh PDHP dengan mengirimkan Jurnal Masyarakat dan Budaya dan berbagai terbitan pada beberapa lembaga pendidikan di daerah. *Knowledge sharing* juga dilakukan melalui kegiatan magang mahasiswa di P2KK dari universitas.

Dari katalog buku-buku P2KK, terlihat adanya beberapa kategori yang penting, seperti tulisan para tokoh yang mengacu pada ilmuwan pionir seperti Mely G. Tan (2012), Taufik Abdullah (2017), "Beberapa Dimensi Kemasyarakatan dan Kebudayaan Kenang-Kenangan Purna Tugas untuk Hilman Adil dan RI Wahono", "Beta Orang Kupang Mengenal John Haba Lewat Para Sahabat". Jurnal Masyarakat dan Budaya menerbitkan isu khusus untuk menghormati redaksinya yang purna tugas seperti Rusydi Syahra dengan tema metode penelitian sosial dan Rusdi Muchtar dengan tema komunikasi.

Membaca diri sendiri merupakan upaya strategis untuk mengaitkan masa lalu dan masa kini untuk *foresight* masa depan. Ada beberapa

hal penting yang perlu digarisbawahi, yaitu melihat modal sosial yang ada, seperti katalog buku memperlihatkan modal pemikiran yang ada, berkaitan dengan kegiatan akademik yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, hubungan sosial – akademik, baik secara individu maupun kelembagaan merupakan salah satu modal yang ada. Hubungan sosial seperti ini memperlihatkan jejaring dalam konteks P2KK sebagai *cluster* dalam kajian ilmu sosial. Dalam sisi aktivitas individual, jejaring ini umumnya menjadi pendukung pada proses tesis dan disertasi sebagai pembaca ahli, maupun sebagai supervisor pendukung. Di dalam proses analisis ini ternyata tidak mudah membuat pengelompokan yang *rigid*, karena terdapat kecenderungan untuk saling berkaitan antar- berbagai isu.

Selain itu, terdapat penerbitan buku oleh penulis tunggal yang mengacu pada keahlian masing-masing individu. Penerbitan buku penulis tunggal antara lain oleh Riwanto Tirtosudarmo dengan kajian migrasi yang dikaitkan dengan isu keIndonesiaan; Herman Hidayat dengan politik lingkungan dan pengelolaan hutan; Nina Widyawati dengan politik identitas; Ahmad Najib Burhani dengan isu Muhammadiyah; Anas Saidi dalam perkembangan keberagamaan; Henny Warsilah pada isu perkotaan; Endang Turmudi dengan fokus Kyai, M. Hisyam dengan kajian sejarah-sosiologi tentang penghulu; dan Widjajanti M. Santoso dengan fokus pada isu gender. Tentu saja mereka merupakan penerus dari penulis tunggal para pionir yaitu Taufik Abdullah, AB Lopian, Mely G. Tan, dan lainnya. Pada umumnya penulis yang aktif juga menjadi editor dari berbagai buku. Beberapa editor merupakan representasi terhadap tokoh atau isu tertentu, seperti Thung Ju Lan yang menjadi editor buku bagi Yohana Paramita yang memberikan perhatian terhadap pengaruh Portugis di Indonesia.

Buku dengan penulis tunggal menunjukkan kemungkinan lebih besar untuk melakukan upaya mengkritisi dan/atau mendiskusikan dalam konteks pengembangan keilmuan. Beberapa diantaranya dimungkinkan karena berkembang dari disertasi yang sudah mengalami perubahan. Walaupun sebagian masih di dalam upaya untuk mendeskripsikan dan memaparkan pandangan atau teori tertentu. Hal ini berkembang dari kegiatan dan pembacaan yang dilakukan oleh peneliti yang bersangkutan, antara lain Judul "Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa

Orde Baru dan Reformasi” ataupun “Penelitian dan Pengarusutamaan Gender; Sebuah Pengantar” (2017).

Upaya membaca diri sendiri muncul di buku berjudul “Mencari Indonesia” buku 1 dan 2. Buku tersebut merupakan kumpulan karangan (Tirtosudarmo, 2015), berupa rangkaian manik-manik. Meskipun masih memiliki kecenderungan sebagai kumpulan karangan, tetapi keinginan untuk mengembangkan sesuatu yang substantif sudah berjalan. Aulia Hadi menulis tentang perkembangan kajian komunikasi di P2KK (Hadi, 2016). Pendapatnya adalah bahwa kajian masih terbatas pada deskripsi, dan kemungkinan untuk membuat generalisasi teoritis terbatas, baik karena sampel terbatas maupun jenis penelitian kualitatif. Di dalam buku tentang refleksi terhadap tokoh Melly G. Tan (2012), digambarkan paparan tentang perkembangan kajian wanita dan saat ini biasa disebut dengan kajian perempuan.

Tulisan-tulisan lainnya yang ada di dalam katalog adalah tulisan yang berkaitan dengan program LIPI, antara lain ketahanan pangan, kebencanaan, energi, Taman Nasional, pengobatan, serta konflik. Di dalam isu ketahanan pangan, fokusnya adalah pada kelembagaan sosial yang berperan sebagai *safety valve institution* ketika terjadi kekeringan. Konsep ini dikembangkan dari konsep lumbung desa yang menjadi tempat penyimpanan. Sebagai institusi, lumbung padi tidak populer ketika terjadi pembangunan, bahkan cenderung menghilang. Lumbung berdasar pada kehidupan di dalam komunitas yang berkaitan dengan dampak pembangunan. Pembangunan yang memiliki ciri perkembangan individu-individu. Perubahan ini juga tampak dari pudarnya keluarga luas yang digantikan dengan keluarga batih. Dalam bentuk keluarga batih, unit keluarga hanya bertanggungjawab terhadap anggota keluarganya, yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Hal yang sama terlihat di dalam diskusi tentang pengobatan tradisional. Penelitian yang menggunakan pandangan dari individu yang menggunakan pengobatan tradisional menceritakan tidak hanya dari sisi mereka yang berhasil tetapi juga dari mereka yang gagal.

Dari segi penelitian tentang kelompok, kelompok rentan yang diacu adalah kelompok penyandang disabilitas, perempuan, minoritas keagamaan, anak jalanan generasi muda, agama

lokal, pengungsi Timor Timur, budaya lokal, dan lansia. Dalam kebencanaan, salah satu fokus kajian adalah pada penyandang disabilitas. Salah satu dampak dari bencana adalah adanya penyandang disabilitas yang seringkali terlupakan di dalam penerimaan bantuan atau perhatian. Selain itu fokus kebencanaan digarap oleh tim perkotaandengan tema kota tangguh bencana. Di dalam masalah energi, terutama dalam pengembangan *micro-hidro*, konteks masyarakat menjadi penting, sebagai penerima dan pengguna, ataupun sebagai kelompok yang harus memelihara teknologi tersebut.

Penelitian strategis lainnya adalah yang bertepatan taman nasional. Taman nasional merupakan salah satu unggulan LIPI. Penelitian ini tidak hanya berupaya mengangkat keunikan dari daerah yang bersangkutan, tetapi juga berkontribusi secara global pada isu-isu lingkungan. Penelitian unggulan IPSK dalam konteks sosial dan budaya mencakup berbagai isu, diantaranya tentang konflik pertanahan setelah reformasi. Isu tersebut terdiri dari banyak konflik, misalnya konflik antara industri dengan masyarakat sekitar, sikap anarkis, serta peran LSM di dalam konflik SDA. Konflik SDA ini terutama berkaitan dengan masyarakat adat, yang terpaksa menerima masukan industri yang merusak ekosistem di tempat mereka berada.

Berkaitan dengan konflik sosial, kajian yang ada mengembangkan isu gerakan (*movement*) yang berkaitan dengan kawasan aliran sungai, korban konflik seperti yang terjadi di Aceh, dan masalah agraria. Kajian yang cenderung bertahan bertahan dalam isunya adalah maritim. Ketika isu ini diangkat pada akhir 1980-an, belum banyak orang yang melihat bahwa isu ini penting dan strategis. Kajian lainnya adalah hutan dengan fokus yang berubah-ubah berdasarkan tipologi atau kategorisasi pemerintah tentang hutan, seperti HTI - atau Hutan Tanaman Industri, hingga Taman Nasional.

Perubahan sosial yang dikategorikan sebagai *contemporary issues* adalah fashion muslimah, media sosial, cyberdemokrasi, nasionalisme, *trafficking*, dan korupsi. Isu lain yang selalu hangat adalah masalah perkotaan, misalnya konteks aglomerasi di Pantura hingga masalah kewargaan.

Isu yang diangkat di dalam tim penelitian juga berkaitan dengan perkembangan dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian tentang budaya Melayu dilakukan

dengan menggunakan metode penelitian tradisi lisan. Kegiatan ini menghasilkan beberapa tulisan, dan juga berhasil mengembangkan Asosiasi Tradisi Lisan (ATL). ATL merupakan kegiatan lintas lembaga yang memberikan perhatian kepada tradisi lisan. Tradisi lisan sendiri merupakan upaya yang berkejaran dengan perubahan sosial yang mendesak dan memarginalisasi tradisi dan kebiasaan yang hidup di masyarakat. Program dan kegiatan ATL diharapkan bisa menjadi upaya mengangkat identitas keindonesiaan melalui tradisi yang pernah berkembang atau diharapkan terus berkembang di masyarakat.

Kajian agama merupakan salah satu ciri dari P2KK. Pada tahun 80-an terdapat kelompok diskusi Selasa yang diampu oleh Nurcholish Majid. Pertemuan ini membahas berbagai isu yang mengundang pakar, dalam dan luar negeri untuk berbagi, baik pengalaman penelitian maupun konsep yang digunakan. Martin Van Bruinessen pernah hadir untuk menentukan proses penelitian yang dilakukannya. Kegiatan berbagi pengalaman ini penting untuk memperkaya perspektif, kemampuan analisis, dan juga etos kerja peneliti. Dalam proses penelitian, terdapat berbagai irisan, sehingga sulit membedakan antara kajian humaniora dengan ilmu sosial, bahkan dengan ilmu agama. Misalnya isu pesan keagamaan di media massa merupakan irisan dari isu humaniora dan isu ilmu sosial. Isu lain yang berkembang adalah hubungan negara dan agama yang problematik, termasuk di dalamnya isu keutuhan sosial yang seakan-akan mengasumsikan bahwa agama memicu perpecahan. Tentang hal ini ada kajian mengenai radikalisme.

Isu yang berkaitan dengan Syariah Islam juga menarik perhatian para peneliti pada bidang agama sehingga ada beberapa penelitian dengan topik tersebut, antara lain Pemetaan Penerapan Hukum Syariah dalam Konteks Pembangunan Sistem Hukum Nasional (2010) dan Dinamika Hukum Agama dan Adat dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional Studi Dinamika Perilaku Kehidupan Masyarakat dalam Penerapan Hukum Ekonomi Syariah (2007). Kajian terdahulu telah membukakan jalan, tetapi pada saat itu Syariah belum menjadi konteks yang dikaji secara khusus. Temuan yang menarik pada penelitian terdahulu adalah adanya deskripsi tentang UU Raja Banjar yang dapat dilihat sebagai upaya untuk menjembatani pertentangan antara agama lokal dan agama

Islam. Raja bertindak bijaksana untuk menerima keberagaman dari masyarakatnya dan memberi solusi terhadap konflik yang mungkin terjadi. Penelitian tentang hukum Syariah ini juga bernafaskan dukungan terhadap perkembangan Islam yang masih berkaitan dengan situasi euforia perubahan rezim Orde Baru.

Kata Syariah digunakan karena kata tersebut tersebar di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Saat ini konteks Syariah Islam menjadi semakin penting karena keberadaannya dan pengaruhnya sudah ada pada tingkat kehidupan keseharian. Konteks seperti ini yang dikembangkan lebih lanjut di dalam penelitian tentang Dinamika Penerapan Syariah Islam. Penelitian Syariah 2015-2019 ini menghadapi tantangan yang lebih besar karena menggabungkan antara aturan normatif yang tidak dapat dihindarkan dengan situasi perubahan sosial (Hefner,1993; Chandra, 2011).

Penerapan Syariah dikomodifikasi oleh kelompok-kelompok sosial yang berusaha memberikan dan menyebarkan pemahaman tentang Islam yang dianggap “benar”. Pada situasi seperti ini, kehidupan keseharian memainkan peran besar, misalnya di dalam fashion muslimah terjadi komodifikasi yang merupakan cerminan dari kelas menengah (muslim) yang berkembang (*Hisyam, et.al., 2016*). Namun, pada isu perkawinan, terlihat situasi yang mendua, dengan melihat masalah ini di dalam pertentangan antara masalah-masalah sosial seperti kawin muda, kawin siri, ataupun kawin kontrak dengan isu pemahaman keagamaan yang normatif seperti diskursus poligami (*Usman, et.al., belum terbit*). Di dalam pembahasan tentang dua sisi seperti itu, masalah menyodorkan hasil lapangan, tetapi juga persoalannya memberikan gambaran tentang diskursus yang berkembang terkait isu tersebut.

Pada kenyataannya, berbagai masalah yang digarap tidak dapat dipisahkan dengan jelas dan tegas, seperti hukum yang menjadi salah satu bagian dari problematik yang ada. Misalnya dalam konteks perempuan, hukum menjadi penting untuk melindungi perempuan. Hukum adalah bagian dari struktur sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kajian hukum memiliki spektrum yang sangat luas, dari hukum yang berkaitan dengan agama seperti syariah Islam, UU Pemerintah Daerah, HP3 atau Hak Penguasaan

Perairan Pesisir, atau masalah penanaman modal. Kajian yang awalnya bermula dari kajian tentang pertanahan, sudah berkembang dengan pesat hingga mencakup masalah HAM dan akhir-akhir ini difokuskan pada hak EKOSOB – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pada isu perempuan, tema yang diangkat adalah berupa seri penelitian tentang perlindungan hukum perempuan seperti pada buruh migran, perempuan dan properti, perempuan dan pengetahuan, serta perempuan dalam konflik sosial. Penelitian bertema gender di P2KK sudah ada sejak dilakukannya penelitian tentang penyebaran konsep gender di perguruan tinggi dan tentang ideologi gender dan transformasi sosial pada 2004. Sejak 2007-2009, dilakukan penelitian berbentuk *time series* dengan isu gender dan buruh migran dalam berbagai sisi, seperti dari daerah pengirim, maupun dari daerah asal. Pada 2010-2014, dilakukan penelitian gender yang berada di bidang hukum dan masalah perempuan dilihat atas dasar isu, seperti pembagian perempuan dan tubuh, perempuan dan kerja, perempuan dan properti, serta perempuan dalam konflik sosial. Pada tahun terakhir kajian ini membuat rangkaian dari keseluruhan isu yang ada dengan penekanan pada representasi perempuan. Tim perempuan dan hukum di P2KK menetapkan untuk menggunakan pendekatan dengan perspektif perempuan, walaupun melepaskan pemahaman atas perspektif tersebut kepada masing-masing peneliti. Masalah yang dihadapi oleh tim adalah bentuk tulisan yang beragam, dari tulisan yang tanpa perspektif, tulisan yang mengikuti wacana posisi perempuan berdasarkan pemahaman umum, hingga tulisan yang mencoba melihat dari perspektif perempuan. Penelitian dengan tema ini sulit dilakukan, antara lain karena anggota tim berubah-ubah karena merasa tidak sesuai dengan temanya, atau terlibat di dalam kegiatan tim lainnya. Sejak 2015, tim gender bersepakat untuk *off* dahulu melakukan *refresing* dengan menggunakan pola PUG, yaitu para peneliti masuk di dalam penelitian yang berbeda-beda, seperti di tim syariah dan media baru.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ideografis yang memaparkan subjek yang diteliti secara mendalam. Penelitian jenis ini membutuhkan beberapa tahapan lagi sebelum menjadi sebuah penjelasan teoretis. Kajian yang ada bergerak dari berbagai isu dan tema, yang dimulai dari kajian komunikasi massa, komunikasi budaya,

dan sekarang ini media sosial. Isunya beragam, mulai dari televisi, pers daerah, persepsi penonton, tayangan Islami, dan lainnya. Salah satu faktor yang berpengaruh nyata terhadap kajian adalah kecenderungan menggunakan kajian komunikasi dalam konteks *applied sciences*. Paparan teoretis digunakan untuk membuat kerangka dan membantu analisis, beberapa diantaranya menggunakan pendekatan untuk menangkap isu-isu perkembangan kontemporer.

M. Hisyam memberikan gambaran kerjasama ilmu pengetahuan sejarah yang melibatkan sejarawan di LIPI, diantaranya peneliti dari P2KK. Di dalam paparannya terlihat bahwa penulisan sejarah berkaitan dengan pandangan yang berkembang pada masyarakat yang ditangkap secara akademis. Situasinya adalah setelah Reformasi 1998, ketika diskursus yang berkembang adalah adanya “kesalahan” dalam penulisan sejarah Indonesia. “Kesalahan” ini berkaitan dengan pandangan atau diskursus pada rezim sebelumnya terhadap peristiwa sejarah. Oleh karena itu, perubahan rezim menghendaki penulisan yang lebih akurat. Berbekal metode sejarah lisan, program ini berjalan, sejalan pula dengan program kerjasama internasional dengan *Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie* (NIOD), yang melihat “*Indonesia Accros Order*”.

Penelitian yang monumental di dalam konteks keluasan dan variasi hasil penelitian diperoleh dari penelitian bahasa sejak 2003. Perkembangan kajian ini mulai dari kajian tematik dengan menyasar bahasa di wilayah Timur Indonesia, kemudian berkembang menjadi penelitian bahasa non-Austronesia dengan pendanaan yang cukup besar melalui skema penelitian nasional. Di dalam perjalanannya, tema lain yang dikembangkan adalah penelitian tentang bahasa yang hampir punah. Penelitian ini menjadi salah satu masukan bagi kebijakan di Indonesia tentang bahasa daerah yang hampir punah. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa daerah seperti daerah suku Oirata di Pulau Kisar, Gamkonora, Kui, Pagu, Kao, dan Kafoa. Program ini merupakan kegiatan multidisiplin yang menggabungkan tidak hanya linguistik tetapi juga ilmu sosial lainnya. Beberapa linguist yang menjadi sumber daya satker, mengembangkan kegiatan bersama dengan Universitas yang memiliki kajian bahasa seperti Universitas Indonesia, Atmajaya, Universitas Lampung, dan lainnya. Di dalam

prosesnya tim-tim ini memiliki mentor para ahli bahasa dan budaya, seperti Benny Hoed dan Multamia Lauder. Untuk mengolah data bahasa, tim menggunakan *software*, sehingga semua peneliti yang terlibat belajar menggunakan *software* ini, meskipun pada kenyataannya hanya beberapa tim yang mampu secara konsisten melaksanakannya.

Kerjasama penelitian model multidisiplin ini menghasilkan berbagai bahan akademis seperti senarai kata (kamus), film tentang kebiasaan budaya, cerita anak, komik, serta bahan ajar untuk muatan lokal pada kelompok bahasa yang diteliti. Bersama masyarakat, tim melakukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama, seperti mendirikan sanggar, melakukan lomba pidato dengan menggunakan bahasa lokal yang hampir punah, serta melakukan penguatan kebahasaan dan budaya dengan mengajakserta *stakeholders* yang ada di tempat tersebut. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari interaksi sosial yang terjadi antara peneliti dengan subjek penelitiannya. Kegiatan tersebut telah menghasilkan lulusan S3 seperti Katubi dan Dahlan Perangin Angin, saat ini menyusul rekan dari tim bahasa lainnya.

Koordinator tim seperti AR Patji, kemudian terlibat di dalam tim untuk membahas bahasa lokal dengan DPD. Dalam kegiatan akademisnya, anggota tim juga bekerja sama dengan lembaga pada tingkat nasional dan lokal, yang memberikan masukan dan mendiskusikan problematika yang terkait dengan situasi kebahasaan di lokasi penelitian. Kegiatan ini terpaksa mengurangi jumlah tim-nya karena terdapat perubahan perencanaan dan pendanaan. Fokus kajiannya juga kemudian berubah dengan melihat konteks bahasa dalam kebangsaan melalui kebijakan kebahasaan. Kegiatan ini juga menghasilkan hubungan sosial yang baik dengan tokoh adat setempat, seperti dengan ibu Afrida Erna Ngato yang ketika penelitian dilaksanakan adalah kepala suku adat di Pagu. Hubungan kegiatan terus berlangsung, bahkan setelah penelitian selesai. Ibu Ida berhasil mengembangkan kesadaran berbahasa yang berbasis penelitian P2KK-LIPI. Sementara itu, beberapa penelitian di dalam tim bahasa berhasil membuat bahan ajar bagi mulok (muatan lokal) untuk tingkat pendidikan dasar

Penutup

Tiga fungsi hub-pengetahuan menunjukkan bahwa produksi ilmu pengetahuan merupakan kegiatan yang dominan, diikuti oleh diseminasi ketrampilan dan ilmu melalui magang, sedangkan transfer pengetahuan dilakukan bersama dengan masyarakat tempat penelitian dilakukan. Hubungan antara peneliti dengan masyarakat saat ini sangat dekat, karena kebutuhan dan masalah secara langsung melibatkan peneliti di dalamnya. Keterlibatan itu sangat bervariasi, ditentukan oleh kondisi yang ada dan dukungan kelembagaan, dalam program dan keuangan. Fokus lembaga pada masyarakat marginal memperlihatkan perhatian terhadap isu-isu publik dan juga pada masalah yang membutuhkan upaya lebih untuk mengangkatnya sebagai sebuah problematika yang membutuhkan solusi.

Analisis hub-pengetahuan merupakan awal yang penting karena memposisikan LIPI, dalam hal ini P2KK, di dalam perkembangan ilmu sosial. Terlihat bahwa pada kegiatan yang berkaitan dengan arsitektur pengetahuan ilmu sosial, para *founding fathers*—melalui lembaga seperti YIIS, HIPIIS, Penerbit Obor; menjadi bagian dari perkembangan tersebut. Peta tersebut sudah berubah, perubahan sedang terjadi dan berbagai pertanyaan bermunculan berkaitan dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang terjadi. Selain itu, kajian seperti ini berguna untuk membuka mata tentang tantangan “baru” yang perlu ditanggapi bersama. Sebagai sebuah hub, P2KK memperlihatkan kegiatan akademis yang perlu mengembangkan jejaring sehingga menjadi kluster di dalam arena geospasial tertentu. Selain itu, kajian yang sudah dilakukan perlu memperhatikan *inter-Asia referencing* untuk mengembangkan kaidah epistemik yang menjawab pertanyaan dari masyarakat pada tingkat nasional dan internasional.

Di dalam perubahan sosial tersebut, posisi kelembagaan berpengaruh, karena lembaga penelitian dipengaruhi oleh model pendanaan dan perencanaan nasional, sehingga para penelitiannya memiliki tugas dan fungsi berganda. Selain itu, di dalam amanat UU, lembaga penelitian memiliki mandat untuk mengembangkan hub-pengetahuan yang memediasi kegiatan penelitian dan kegiatan akademis lainnya. Hubungan kerjasama dengan lembaga akademis dari luar Indonesia merupakan kegiatan yang

penting dan perlu dikembangkan secara egaliter. Sebagaimana hubungan kerjasama akademis, diharapkan juga nama-nama peneliti atau akademisi dari Indonesia bisa lebih banyak memiliki akses ke dunia global.

Kerjasama akademis pada umumnya masih terpusat di Jakarta, sedangkan kegiatan bersama yang dikembangkan di daerah umumnya hanya berkaitan dengan proses penelitian yang dilakukan. Proses penelitian bahasa yang dilakukan secara bersama-sama dengan pendanaan yang komprehensif memberikan kesempatan untuk berkembang secara simultan dengan kegiatan masyarakat di lapangan. Di dalam kegiatan dengan daerah, peneliti melakukan proses penelitian yang saling menguntungkan, ketika peneliti tidak meninggalkan subjek penelitiannya, bahkan mengembangkan identitas dan kedirian daerah. Perkembangan ini perlu diapresiasi sebagai bagian dari perkembangan metodologi yang dilakukan. Meskipun masih berskala kecil, tetapi kegiatan ini memperlihatkan adanya ide, embrio dari kepekaan dan tanggungjawab akademis yang dimiliki peneliti dan lembaganya.

Di dalam kerjasama, peneliti banyak bekerjasama dengan universitas sebagai mitra dan masyarakat sipil untuk mengembangkan temanya. Beberapa peneliti P2KK-LIPI seperti Ahmad Najib Burhani menjadi tenaga ahli untuk menggarap kebijakan yang berkaitan dengan agama minoritas, Dedy Adhuri dengan masyarakat adat, dan A.R. Patji dengan bahasa daerah. Kegiatan seperti ini merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan akademis, berkaitan dengan pilahan yang dibuat oleh Buroway, maka terlihat bahwa irisan-irisannya mewarnai kehidupan akademis yang ada. Pilahan-pilahan yang digambarkan oleh Buroway, tampaknya tidak dapat diterapkan secara *rigid*, karena di dalam kegiatannya semua pilahan tersebut berbaur. Peneliti tidak hanya diharapkan membuat tulisan akademik tetapi juga diharapkan untuk membuat *policy paper* dan mempengaruhi pembuatan kebijakan. Tugas yang sama sekali tidak mudah, karena para akademisi seakan punya dua kaki yang saling tarik menarik. Kegiatan peneliti dan penelitian yang dikembangkan di P2KK pada umumnya berkaitan dengan kelompok marginal yang memiliki problematika di dalam hubungan kekuasaan. Peneliti harus melakukan dialog dengan dua kepentingan yang bisa saja berbeda. Beban peneliti tidak hanya dalam

penguasaan tentang keilmuan tetapi juga kemampuannya untuk memediasi dan memasukan ide-ide inklusi di dalamnya.

Kegiatan *peer group*, baik dengan universitas maupun dengan masyarakat sipil, penting untuk mengangkat isu bersama. Beberapa kajian dimulai dengan cara itu, dengan tujuan “akademik” yang bisa saja secara birokrasi mendapatkan dukungan. Cara ini mempermudah sebuah isu untuk ditanggapi oleh birokrat, karena pentingnya ide tersebut. Kajian komunikasi cenderung bertahan menghadapi tantangan untuk mampu melihat perubahan sosial yang terjadi sangat penting dilakukan karena adanya perubahan teknologi dan jejaring dunia. Kajian Penerapan Syariah Islam memperlihatkan bahwa kesinambungan isunya menjadi penting karena memiliki konteks yang berkaitan dengan perbedaan pemaknaan yang terjadi. Meski sama-sama berbicara tentang syariah Islam, namun konteks sosialnya berbeda, sesuai dengan situasi internal Indonesia seperti perubahan rejim dari Orba menjadi Orde Reformasi dan juga perubahan eksternal karena globalisasi.

Analisis sub-pengetahuan merupakan langkah yang penting untuk menunjukkan proses menghasilkan, mentransfer pengetahuan, dan membangun jejaring akademis melalui kegiatan ilmiah. Langkah ini merupakan awal dari penelitian dengan menggunakan mekanisme Evers yang lengkap. Pemetaan yang lebih lengkap sangat dibutuhkan untuk menunjukkan porsi saling berjejaring dan bekerjasama yang menjadi asumsi dari perkembangan dunia global dan milenial. Kegiatan berjejaring merupakan langkah yang penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Tantangannya sangat besar, misalnya *inter-Asia referencing*, merupakan pemikiran yang penting di dalam konteks ini. Mampukah kita mengembangkan hal itu, meskipun sudah ada embrio dari kegiatan yang dilakukan. Namun, pengembangannya berkaitan dengan kegiatan berjejaring akademis yang sadar akan posisi Dunia Ketiga atau Asia sebagai lokus keilmuan yang tidak hanya berupa keinginan melainkan sesuatu yang dapat dikembangkan dan dikerjakan. Secara umum, analisis struktur seperti memberikan pemetaan tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang bisa dikembangkan selanjutnya. Kajian yang lebih mendalam perlu dilakukan terutama untuk melihat secara substantif penggunaan perspektif, pandangan, metodologi, dan hasil dari kajian,

untuk mengembangkan potensi perkembangan keilmuan menjadi perkembangan pemikiran.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. (2017). Tiga Dimensi Ilmu Sosial dalam Dinamika Sejarah Bangsa. Kleden Ignas dan Taufik Abdullah (eds). Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Penelitian, Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora di Indonesia. Jakarta: LIPI Press.
- Achwan, Rochman. (2016). "Ilmu Sosial di Indonesia, Peluang, Persoalan dan Tantangan", dalam dalam Widjajanti M.Santoso. *Ilmu Sosial di Indonesia, Perkembangan dan Tantangan*. Jakarta: Buku Obor.
- Afiff, Suraya. (2017). Seminar CBFM-LIPI. Jakarta, 19 Oktober 2017.
- Anderson, Benedict (Revised Edition). (2006). *Imagined Communities, Reflection of the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Buroway, Michael.(2005). "Public Sociology", *American Sociological Review*. Feb 2005, Vol 70, Iss 1.
- Chua Beng Huat. (2015). "Inter-Asia Refencing and Shifting Frames of Comparison" dalam Carol Johnson, Vera Mackie, Tessa Morris-Suzuki (eds), *The Social Sciences in The Asian Century*, Australia: ANU Press.
- Chandra, Dilip. (2011). "The Role of Islam in Contemporary Indonesia: Search for a New Paradigm", dalam Paul Van der Velde, Alec McKay (eds). *New Developments in Asian Studies: an Introduction*. New York, Routledge.
- Dhakidae, Daniel. (2003). *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Elga, Andina. (2011). "Buku Digital dan Pengaturannya". *Jurnal Aspirasi* Vol. 2 No. 1 2011. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/429>, diakses 6 September 2017.
- Evers, Hans Dieter dan Solvay Gerke. (2005). "Local and Global Knowledge: Social Science Research on Southeast Asia", dalam Thomas Menkoff, Hans Dieter Evers, Yue Wah Chay. *Governing and Managing Knowledge in Asia*. Singapore: World Scientific Publishing Co.
- Evers, Hans-Dieter. (2008). *Knowledge Hubs And Knowledge Clusters: Designing A Knowledge Architecture For Development*. ZEF Working Paper Series, No. 27. <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0202-20080911278>, diakses 23 Oktober 2017.
- Ghatak, Saran dan Andrew Stuart Abel. (2013). "Power/Faith: Governmentality, Religion and Post Secular Societies". *International Journal of Politics, Culture and Society* Vol 26 No 3 September, 2013. <http://www.jstor.org/stable/24713368>.
- Gramsci, Antonio. (1971). *Selections from Prison Notebooks*. London: Elec Book. <http://abahlali.org/files/gramsci.pdf>, diakses 11 April 2018.
- Hadi, Aulia. (2016). "Dinamika Studi Komunikasi di Indonesia, Sebuah Meta Analisis Kualitatif Hasil Hasil Penelitian LIPI" dalam Widjajanti M. Santoso, *Ilmu Sosial di Indonesia, Perkembangan dan Tantangan*. Jakarta: Buku Obor.
- Hadiz, Vedy.(2016). "Ilmu Sosial dalam Konteks Otoritarianisme, Demokrasi dan Tuntutan Pasar", dalam Widjajanti M. Santoso (ed). *Ilmu Sosial di Indonesia, Perkembangan dan Tantangan*. Jakarta: Buku Obor.
- Hefner, Robert W, (1993). "Islam, State and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesian Middle Class". *Indonesia* No 56 (Oct,1993) pp1-35. Southeast Asia Program Publications at Cornell University. <http://www.jstor.org/stable/3351197>.
- Hisyam, M. (2016). "Penulisan Sejarah Indonesia Sebuah Refleksi", dalam Widjajanti M Santoso. *Ilmu Sosial di Indonesia, Perkembangan dan Tantangan*. Jakarta: Buku Obor.
- Hobsbawn, Eric dan Terence Ranger (ed). (2013). *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kleden, Ignas dan Taufik Abdullah (eds). (2017). *Paradigma Ilmu Pengetahuan*

- dan Penelitian, Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora di Indonesia. Jakarta: LIPI Press.
- Melly, G Tan. (2012). LIPI “Tempat Dimana Karir Saya Berkembang”, dalam Widjajanti M. Santoso, Ana Windarsih (eds). *Refleksi 80 Tahun Melly G. Tan, Perspektif Perempuan dan Pembangunan*. Jakarta: Gading Inti Prima.
- Miller, Claire Cain. (2011). *E-books Outsell Print Books in Amazon*, dalam <http://tony-silva.com/eslefl/miscstudent/downloadpagearticles/ebooksales-nyt.pdf>, diakses 6 September 2017.
- Peeters, Jeroen. (1998). “Islamic Book Publishers in Indonesia: A Social Network Analysis”. Paul Van der Velde, Alex Mckay. *New Developments in Asian Studies: an Introduction*. London: Routledge.
- P2KK.(2016). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- P2KK. (2017). *Katalog Hasil Penelitian P2KK-LIPI 2000-2015*. Jakarta: P2KK-LIPI.
- Rainie, Lee dan Maeve Duggan. (2012). *E-books Reading Jumps, Print Book Reading Declined*, <http://libraries.pewinternet.org/2012/12/27/e-book-reading-jumps-print-book-reading-declines/>, diakses 6 September 2017.
- Riyanto, Geger. (2017). ‘*Brave New World*’ *Perbukuan Indonesia*, September 8, 2017 5.43pm WIB, http://theconversation.com/brave-new-world-perbukuan-indonesia-82083?utm_medium.
- Santoso, Widjajanti M. dan Ana Windarsih (ed). (2012). *Refleksi 80 Tahun Melly G. Tan, Perspektif Perempuan dan Pembangunan*. Jakarta: Gading Inti Prima.
- Santoso, Widjajanti M. (ed). (2016). *Ilmu Sosial di Indonesia, Perkembangan dan Tantangan*. Jakarta: Buku Obor.
- Santoso, Widjajanti M, (2017). *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar*. Jakarta: LIPI Press.
- Sudiyono, et.al. (2017). Tulisan tidak diterbitkan. *Peningkatan Semangat Kebangsaan melalui Penguatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat*. Jakarta: P2KK-LIPI.
- Soedjatmoko, J.L. Tamba, et. al. (1980). *Kemiskinan Struktural – Suatu Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Soedjatmoko, et. al. (1984). *Krisis Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan di Dunia Ketiga*. Jakarta: Pusat Latihan, Penelitian, dan Pengembangan Masyarakat.
- Soedjatmoko. (1984). *Etika Pembebasan*. Jakarta: LP3ES.
- Soedjatmoko.(1986). *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan: Pilihan Karangan*. Jakarta: LP3ES.
- Suparlan, Parsudi. (1993). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Penerbit Obor.
- Thung Ju Lan, et. al. (2017). Tulisan tidak diterbitkan. *Problematika Menempatkan Tradisi-tradisi dan Kepercayaan Lokal dalam Kebangsaan Indonesia yang Multikultural*. Jakarta: P2KK-LIPI.
- Tim Penulis Sejarah Obor. (2017). *40 Tahun Pustaka Obor, Turut Menerangi Zaman*. Jakarta: Penerbit Obor.
- Zed, Mestika.(2014). *Konstruksi Historis Ilmu Sosial Indonesia dalam Perspektif Komparatif Menggali Ilmu Sosial Bercorak Keindonesiaan*. Seminar Nasional bertajuk “Kontruksi Ilmu Sosial di Indonesia Perspektif Komparatif: Menuju Ilmu Sosial ‘Keindonesiaan’”, diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dalam rangka Dies Natalis UNY ke-50, Yogyakarta, 30 April 2014.
- Kompas. 30 November 2017. Kebijakan SDG’s Kurang Didukung Kajian Ilmiah, Organisasi Masyarakat Sipil Pertanyakan Komitmen Pemerintah.
<http://www.obor.or.id/>
<http://www.hariansejarah.id/2016/09/kalau-saya-seorang-belanda-als-ik-eens.html>, diakses 11 Desember 2017.
<http://www.ekonomi.lipi.go.id/id/profile/sejarah-0>, diakses 11 April 2018.

